Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA
Pendidikan dan Kebudayaan

XLVIII/November - 2020

12 *Bantuan Kuota Internet*
Penuhi Hak Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19

16 *Proses Penyaluran Bantuan Kuota Belajar*
Lewati Mekanisme, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel

24 *Kesaksian Para Penerima Bantuan*
Menikmati Teknologi Tanpa Khawatir Mahalnya Biaya Internet

Meringankan Beban dengan Bantuan Kuota Internet

DAFTAR ISI

04 Salam Mas Mendikbud

06 Sekilas Kemendikbud

FOKUS

09 PJJ Hadapi Berbagai Tantangan
Program Bantuan Kuota Internet Jadi Salah Satu Solusi

12 Bantuan Kuota Internet
Penuhi Hak Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19

16 Proses Penyaluran Bantuan Kuota Belajar
Lewati Mekanisme, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel

20 Pertanyaan Seputar Program Bantuan Kuota Belajar
Apa yang Harus Saya Lakukan?

24 **Kesaksian Para Penerima Bantuan**
Menikmati Teknologi Tanpa Khawatir Mahalnya Biaya Internet

28 OPINI
Unifah Rasyidi
Agar Tepat Sasaran Tata Kelola Program Pulsa Gratis Perlu Ditingkatkan

30 RESENSI
Berpetualang Sambil Belajar Nilai Budaya Masa Lampau

31 INFOGRAFIS PERPUSTAKAAN
Ayo Unduh Eperpusdikbud

32 SEPUTAR DUNIA PERFILMAN INDONESIA
Resensi Film:
Guru-Guru Gokil
Aksi Kompak Guru Lawan Perampok

35 KEBUDAYAAN
Ruang Dialog dan Ekspresi Pemajuan Kebudayaan
PKN Kembali Digelar untuk Kedua Kalinya

38 KAJIAN
Kemampuan Literasi Finansial dan Literasi Digital pada Keluarga Pekerja Migran

41 BANGGA BERBAHASA INDONESIA
Ruang Dialog dan Ekspresi Pemajuan Kebudayaan
Merawat Kebinekaan dan Tingkatkan Literasi Berbahasa

SAPA REDAKSI

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi salah satu kebijakan di bidang pendidikan yang diambil pemerintah dalam menyikapi kondisi pandemi akibat virus Korona. Pembelajaran tatap muka yang belum mungkin dilakukan saat ini, terutama di zona merah dan oranye, diganti dengan belajar dari rumah. Banyak cara dilakukan oleh satuan pendidikan untuk tetap melanjutkan pembelajaran bagi para generasi penerus bangsa itu. Salah satunya memanfaatkan internet dan teknologi untuk pembelajaran.

Pemanfaatan internet tersebut berkonsekuensi terhadap kebutuhan data internet. Penggunaan data internet untuk pembelajaran cukup besar, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri bagi rumah tangga dengan penghasilan rendah atau hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang sama juga tidak jauh berbeda pada mereka yang berada di golongan menengah. Penggunaan data internet yang juga banyak tergerus untuk kebutuhan bekerja dari rumah, kini ditambah untuk kebutuhan belajar dari rumah. Hampir semua kalangan merasakan kondisi "berat" berada dalam situasi ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjawab keluhan tersebut dengan memberikan bantuan berupa kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Mereka yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dipastikan menerima bantuan tersebut. Kebijakan inilah yang JENDELA kupas pada edisi kali ini. Di samping itu, redaksi juga menampilkan wawancara bersama pengamat pendidikan tentang program bantuan ini.

Sementara itu pada rubrik lainnya, redaksi kembali hadirkan resensi buku yang mengulas singkat tentang buku berjudul "Berpetualang Ke Negeri Panai Padanglawas". Buku ini berisi hasil penelitian Balai Arkeologi Sumatera Utara. Meskipun menyajikan hasil penelitian, buku ini mudah dimengerti pembaca karena menggunakan pemilihan kata yang sederhana. Baca selengkapnya di halaman 30.

Untuk rubrik **Seputar Film Indonesia**, redaksi menyajikan ulasan tentang film Indonesia berjudul "Guru-Guru Gokil". Film yang rilis bertepatan dengan hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020 ini menceritakan kisah guru dengan segala persoalan yang ada, serta menyelesaikan misi dalam menghadapi perampok. Baca ulasannya di halaman 32 s.d. 33.

Pada rubrik **Kebudayaan**, kami hadirkan artikel mengenai pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2020. Gelaran kebudayaan ini berskala nasional ini kembali digelar untuk kedua kalinya, setelah pada kali pertama diselenggarakan pada 2019. PKN 2020 hadir dalam satu bulan penuh dengan format dalam jaringan (*online*) dan disiarkan di stasiun TVRI. Apa dan seperti apa PKN ditampilkan pada halaman 35 s.d 37.

Selanjutnya, rubrik terakhir yang tidak kalah menarik adalah **Bangga Berbahasa Indonesia**. Kali ini redaksi suguhkan artikel ringan tentang peringatan Bulan Bahasa dan Sastra yang berlangsung di Oktober 2020. Peringatan tersebut tampil berbeda tahun ini mengingat pandemi Covid-19 yang tengah melanda. Seluruh rangkaian perayaan Bulan Bahasa dan Sastra dilakukan secara daring dan mengetengahkan tema "Berbahasa untuk Indonesia Sehat".

Akhir kata redaksi mengucapkan selamat menikmati suguhan yang tersaji pada edisi kali ini. Semoga para pembaca budiman dapat mengambil informasi dan manfaat dari seluruh artikel ini. Terima kasih.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim
Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im
Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Muhamad Heikal
Penanggung Jawab: Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Evy Mulyani
Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto
Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini
Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Dennis Sugianto, Intan Indriaswarti, Nur Widianto, Lany Fitriana, Aline Rogelionick
Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi
Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413

kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
@kemdikbud_RI
KEMENDIKBUD RI
Kemdikbud.RI
Kemdikbud.RI
jendela.kemdikbud.go.id

Salam Mas Mendikbud

Kita paham dan sadari betul, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan pada sebagian besar sekolah di Indonesia saat ini, tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Biaya internet untuk kebutuhan PJJ sangatlah membebani.

Menjawab persoalan tersebut, kami menindaklanjutinya dengan sebuah kebijakan yang diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat akan kebutuhan internet yang saat ini telah menjadi kebutuhan vital. Kami berjuang dan berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk kebijakan ini.

Kebijakan berupa bantuan kuota internet diberikan bagi empat kelompok, yaitu siswa di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 20 GB, siswa di jenjang

pendidikan dasar dan menengah sebesar 35 GB, guru PAUD dan pendidikan dasar dan menengah sebesar 45 GB, serta mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB. Mereka yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) berhak mendapatkan bantuan ini.

Kuota diberikan untuk waktu empat bulan, mulai September hingga Desember 2020. Setiap nomor peserta didik dan pendidik didaftarkan melalui sekolah dan kampus masing-masing untuk kemudian disampaikan ke Kemendikbud melalui Dapodik dan PD Dikti. Nomor-nomor ini kemudian diserahkan pada operator telekomunikasi untuk mulai menyalurkan bantuan kuota internet tersebut.

Alhamdulillah, di bulan pertama penyaluran bantuan kuota bisa mencapai sebanyak 27,3 juta penerima.

Sementara pada bulan kedua, tersalur sebanyak 35,7 juta penerima bantuan kuota. Pada penyaluran kedua ini, kami juga mendengar masukan dari sejumlah pihak, sehingga menambah hingga 2.690 aplikasi laman yang dapat diakses menggunakan kuota belajar.

Ini merupakan pertama kalinya pemerintah melakukan inisitif pemberian kuota dalam skala se-masif ini. Kami menyadari dalam pembelajaran jarak jauh akan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Kemendikbud akan terus hadir untuk memantau proses ini, serta melakukan penyempurnaan. Kemendikbud juga terus mendukung bantuan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan kuota di masa PJJ, terutama pada saat pandemi ini.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa bagi mereka yang belum menerima bantuan kuota untuk tidak khawatir. Silakan laporkan segera ke kepala sekolah atau ke operator sekolah untuk mengoreksi nomor ponsel yang didaftarkan. Setiap bulan, kami memberikan dua kali kesempatan untuk memastikan nomor tersebut akurat dan dalam keadaan aktif.

Terakhir, kami berharap kebijakan ini bisa menjawab permintaan dan kecemasan masyarakat dengan beban penggunaan data internat yang meningkat. Semoga program ini dapat mendukung siswa-siswa kita, mahasiswa kita, dan pendidik kita dalam masa yang sulit ini, untuk dapat terus mencerdaskan bangsa. Amin. **(*)**

12/9
2020

Kemendikbud Gelar Webinar Gerakan Literasi untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) menggelar webinar yang bertemakan "Gerakan Literasi untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila" pada Sabtu, (12/09). Webinar yang diselenggarakan selama dua jam ini menghadirkan empat narasumber pegiat literasi, yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, E. Aminudin Aziz; penulis dan penyair serta pengawas SMP dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Rina Heryani; peraih penghargaan lomba debat internasional, Judah Purwanto; dan pegiat literasi dan pendiri Narabahasa, Ivan Lanin. Keempat narasumber memberikan materi dan pesan edukatif terkait peran vital literasi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul kepada para peserta. Tidak hanya penyampaian materi, webinar ini juga mengajak para peserta untuk aktif mengikuti webinar melalui sesi kuis dan sesi tanya jawab dengan para narasumber. **(INT)**

14/9
2020

Kemendikbud Luncurkan Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya pada Senin (14/9). Peluncuran logo ini berlangsung secara virtual melalui telekonferensi yang disiarkan pula di kanal Youtube Ditjen Dikti. Peluncuran ini dihadiri hingga 3.900 peserta yang terdiri atas pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pada acara peluncuran ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menyampaikan bahwa logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya mencerminkan semangat yang harus dibawa, memerdekakan diri untuk meruntuhkan tembok antarinstitusi, dunia kerja, dan dunia nyata. Diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi mata air bagi industri, pembangunan masyarakat, pembangunan sosial, dan pembangunan Indonesia secara luas.

Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya memiliki tiga pesan kunci antara lain adalah semangat gotong-royong, semangat belajar yang kreatif dan inovatif, semangat menghasilkan generasi emas untuk Indonesia di masa depan. **(INT)**

Sumber: kemdikbud.go.id

25/9 2020

Program Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2020 Telah Dibuka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) kembali membuka Program Beasiswa Unggulan tahun 2020. Program Beasiswa Unggulan tahun 2020 mengalami beberapa penyesuaian akibat kondisi pandemi Covid-19. Subkoordinator Program Beasiswa Unggulan Puslapdik, I Wayan Loster, pada Webinar Sosisalisasi Pembukaan Beasiswa secara virtual (25/9) menuturkan, peserta yang diperkenankan mendaftar BU tahun ini hanya mahasiswa yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, untuk seleksi tahap kedua yaitu wawancara, prosesnya akan mengutamakan unsur kesehatan dan keselamatan dengan dilakukan secara virtual dan tatap muka hanya dimungkinkan pada zona wilayah yang dinyatakan aman.

Pendaftaran program Beasiswa Unggulan dibuka hingga 3 Oktober 2020. Mahasiswa dapat menyimak informasi lebih lanjut melalui laman beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Serta menghubungi surel beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id atau saluran telepon cepat di 082167556665. **(INT)**

30/9 2020

Kolaborasi Program Pendidikan Penting untuk Wujudkan *Link and Match*

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto, mengapresiasi kolaborasi yang melibatkan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) dalam rangka mendukung terwujudnya *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri. Gerakan ini merupakan gerakan perubahan dari akar rumput bersama guru dan masyarakat untuk mentransformasi sekolah menjadi tempat yang ideal bagi siswa.

"Sinergitas antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pegiat pendidikan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan ekosistem pendidikan", tutur Wikan dalam *Workshop* Penguatan Eksosistem SMK melalui "Gerakan Sekolah Menyenangkan" (GSM), di Yogyakarta, Rabu (30/9).

Program ini bertujuan untuk menginternalisasi tugas dan tanggung jawab Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi / BPPMPV sebagai pemimpin lembaga yang berfungsi untuk mencetak dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. **(INT)**

Sumber: kemdikbud.go.id

BERTANI HARUS DI DESA? SIAPA BILANG?

Budidaya Tanaman Sayur dan Buah dengan Teknik Hidroponik

Budidaya Jamur Pangan

Teknik Kultur Jaringan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Budidaya Kolam Terpal

Budidaya Lobster Air Tawar

Minat belajar? Yuk, hubungi kami di

SEAMEO BIOTROP

Pusat Studi Biologi Tropis Asia Tenggara

E-Mail: gau@biotrop.org | Telepon: +62-251-8323848

@seomeobiotrop
@biotrop
@seomeobiotrop

FOTO: Irhan Khoirul Akbar, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud

PJJ Hadapi Berbagai Tantangan

Program Bantuan Kuota Internet Jadi Salah Satu Solusi

Keterbatasan ketersediaan paket data atau kuota internet bagi pendidik dan peserta didik menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. Kebijakan bantuan kuota internet dari pemerintah diharapkan dapat membantu siswa, mahasiswa, guru, dan dosen dalam mengakses informasi dan sumber belajar selama menjalani PJJ. Kebijakan ini diambil setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan riset melalui metode survei untuk memetakan kebutuhan pendidik dan peserta didik.

Kebijakan bantuan kuota internet dari pemerintah merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Data dari Kemenkominfo menyebutkan, sekitar 60 juta anak Indonesia harus mengikuti pembelajaran secara daring sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang dimulai sejak pertengahan Maret 2020.

Lakukan Riset dan Survei

Pada Mei hingga Juni 2020, UNICEF mengadakan survei terhadap 4.018 responden mengenai pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Hasil survei menunjukkan,

Esensi dari kebijakan ini adalah agar generasi bangsa bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan dengan menggunakan media internet selama pandemi Covid-19. Bantuan kuota internet menjadi salah satu solusi untuk mendukung pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

sebanyak 62 persen responden menyatakan mereka membutuhkan bantuan kuota internet. Survei UNICEF tersebut juga menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan PJJ adalah keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik.

Pada Mei 2020, Kemendikbud juga melakukan riset dengan metode survei. Salah satu hal yang ingin diketahui dari survei tersebut adalah mengenai cara siswa belajar dari rumah. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden pada tiap jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, menyatakan bahwa metode belajar mereka selama PJJ adalah mengerjakan soal-soal dari guru yang diberikan melalui aplikasi Whatsapp. Selain itu,metode lain yang terkait dengan penggunaan internet adalah belajar interaktif bersama guru dengan menggunakan aplikasi konferensi video; belajar dari sumber belajar digital (Youtube, Google, dll); dan belajar dari aplikasi sumber belajar daring (Rumah Belajar, Ruangguru, Zenius, dll).

Dari survei tersebut, Kemendikbud juga mendapatkan hasil mengenai hambatan yang dihadapi siswa selama menjalani kegiatan belajar dari rumah. Lima hambatan terbesar yang dihadapi siswa berdasarkan urutan persentase jawaban responden adalah: (1) tidak dapat bertanya langsung kepada guru; (2) kesulitan memahami pelajaran; (3) kurang konsentrasi; (4) bosan; dan (5) jaringan internet kurang memadai.

Survei selanjutnya dilakukan Kemendikbud bekerja sama dengan Telkomsel pada Juli 2020, dengan total responden sebanyak 439.037 orang. Berdasarkan hasil survei responden daring per 28 Juli 2020 pukul 23.59 WIB, empat aplikasi konferensi video yang paling banyak digunakan selama PJJ adalah Whatsapp Video Call (41,18 persen), Zoom (30,59 persen), Google Hangout (6,71 persen), dan Webex (2,64 persen). Dari survei yang sama, Kemendikbud dan Telkomsel juga menghitung asumsi kebutuhan kuota data internet untuk konferensi video dalam PJJ. Untuk

FOTO: Muhamad Ridwan Abdul Aziz, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud

siswa, asumsi perhitungan konsumsi kuota data untuk konferensi video sebesar 1,35 GB/jam. Angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam simulasi, yakni asumsi konsumsi kuota data (1,35 GB) dikalikan dengan asumsi jumlah hari aktif pembelajaran (5 hari x 4 minggu = 20 hari). Simulasi perhitungan kebutuhan data internet dan biaya untuk konferensi video dalam PJJ kemudian menjadi 1,35 GB x 20 hari = 27 GB per bulan.
Kemendikbud dan Telkomsel juga membuat asumsi perhitungan konsumsi kuota data guru untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan koordinasi. Untuk KBM, rinciannya adalah 2 jam x 5 hari x 4 minggu x 1,35 GB, sehingga didapatkan total 54 GB. Lalu untuk aktivitas koordinasi, rinciannya adalah 1 jam x 1 hari x 4 minggu x 1,35 GB, sehingga didapatkan total 5,4 GB. Dengan begitu, asumsi perhitungan konsumsi kuota data untuk guru didapatkan angka 59,4 GB per bulan.

Biaya untuk Internet

Di jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbud

FOTO: Immanuel, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud.

melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga menggelar survei terkait PJJ selama masa pandemi Covid-19 pada April 2020. Survei mengambil sampel 237.193 mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, dengan rincian 67,42 persen responden adalah mahasiswa perempuan dan 32,58 persen responden adalah mahasiswa laki-laki. Dari survei tersebut didapatkan hasil bahwa kendala utama dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi adalah koneksi internet, yakni mulai dari koneksi yang tidak stabil hingga biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa dan dosen agar terkoneksi ke jaringan internet.

Hasilnya, mayoritas mahasiswa mengeluhkan fasilitas internet selama PJJ (63,11 persen). Dari keluhan tersebut teridentifikasi tiga masalah yang muncul, yaitu internet tidak stabil (30,85 persen); kuota internet tidak mencukupi (11,29 persen); dan gabungan keduanya (20,97 persen). Survei tersebut juga menemukan fakta bahwa mahasiswa dapat menghabiskan kuota internet dalam kisaran Rp10.000 hingga Rp400.000 per bulan. Sementara terkait perangkat atau gawai yang digunakan mahasiswa, sebagian besar responden menggunakan ponsel pintar (68,71 persen), sedangkan sisanya menggunakan laptop/*notebook* (14,34 persen), komputer/*desktop* (10,7 persen), dan tablet (0,67 persen).

Survei-survei tersebut menjadi latar belakang kebijakan bantuan kuota internet dari pemerintah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di semua jenjang pendidikan. Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dengan didukung Kemenkominfo kemudian berkoordinasi dengan semua operator seluler agar program bantuan kuota internet bisa terlaksana dengan lancar. Internet menjadi salah satu kunci supaya hambatan yang dialami selama PJJ dapat teratasi dengan baik.

Esensi dari kebijakan ini adalah agar generasi bangsa bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan dengan menggunakan media internet selama pandemi Covid-19. Bantuan kuota internet menjadi salah satu solusi untuk mendukung pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi, sehingga akses untuk layanan pendidikan tetap dapat terpenuhi.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI pada 27 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan kuota internet selama empat bulan, yakni September hingga Desember 2020.

Anggaran sebesar itu harus benar-benar dipastikan pemanfaatannya untuk pembelajaran, dan bukan untuk fungsi lainnya. Karena itulah Kemendikbud membuat skema pembagian jenis kuota, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum dapat digunakan untuk mengakses semua aplikasi, sedangkan kuota belajar hanya bisa digunakan untuk mengakses aplikasi pembelajaran yang terdaftar di laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id. **(DES)**

Bantuan Kuota Internet

Penuhi Hak Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19

Di masa pandemi *corona virus disease* (Covid-19), pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap berupaya memastikan hak belajar setiap peserta didik agar terpenuhi. Satu dari hal itu adalah bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada peserta didik dan pendidik. Bantuan kuota tersebut terdiri dari kuota umum dan kuota belajar dengan jumlah tertentu.

FOTO: Sukmawan Novandi Nurrohman, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud.

Alokasi kuota bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 gigabyte/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 gigabyte / bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 gigabyte /bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 gigabyte /bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.

Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mejelaskan, keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama PJJ. Solusinya, kata dia, Kemendikbud beserta para pemangku kepentingan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan terhitung sejak September 2020 senilai Rp7,2 triliun.

Para pemangku kepentingan yang terlibat pada kebijakan bantuan kuota internet ini antara lain Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Selain itu operator seluler yang mendukung kebijakan ini antara lain Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, AXIS, 3 (Tri), dan Smartfren.

Mendikbud Nadiem menegaskan kuota internet akan dibagikan merata kepada seluruh pendidik dan peserta didik yang telah terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Para orang tua siswa juga tidak perlu khawatir jika anak-anak mereka belum mendapatkan bantuan kuota, karena mekanisme penyalurannya dilakukan bertahap.

Program kerja kami dari awal tidak pernah berubah. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh adalah tiga strategi yang dijalankan secara baik. Kebijakan bantuan kuota data internet menjadi bagian dari Indonesia tetap kerja

– Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Tohir

FOTO: Putri Aprilianti, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud.

"Saya bersyukur atas kerja sama dan koordinasi yang baik lintas kementerian dan lembaga sehingga kebijakan bantuan kuota data internet dapat terealisasi. Saya berharap seluruh pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan kuota data internet tersebut untuk belajar," ujar Mendikbud Nadiem pada Peresmian Kebijakan Bantuan Kuota Internet melalui aplikasi Zoom Meeting, Jumat (25/9/2020).

Senada hal itu, Plt. Kepada Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Hasan Chabibie memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi program bantuan kuota internet ini senantiasa diutamakan. Setiap langkah pada program ini berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta para pihak lainnya.

Peserta Didik Jenjang PAUD

20 GB / bulan

5 GB Kuota Umum
15 GB Kuota Belajar
1 Bulan Durasi Bantuan

Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

35 GB / bulan

5 GB Kuota Umum
30 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan

Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah

42 GB / bulan

5 GB Kuota Umum
37 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan

Dosen dan Mahasiswa

50 GB / bulan

5 GB Kuota Umum
45 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan

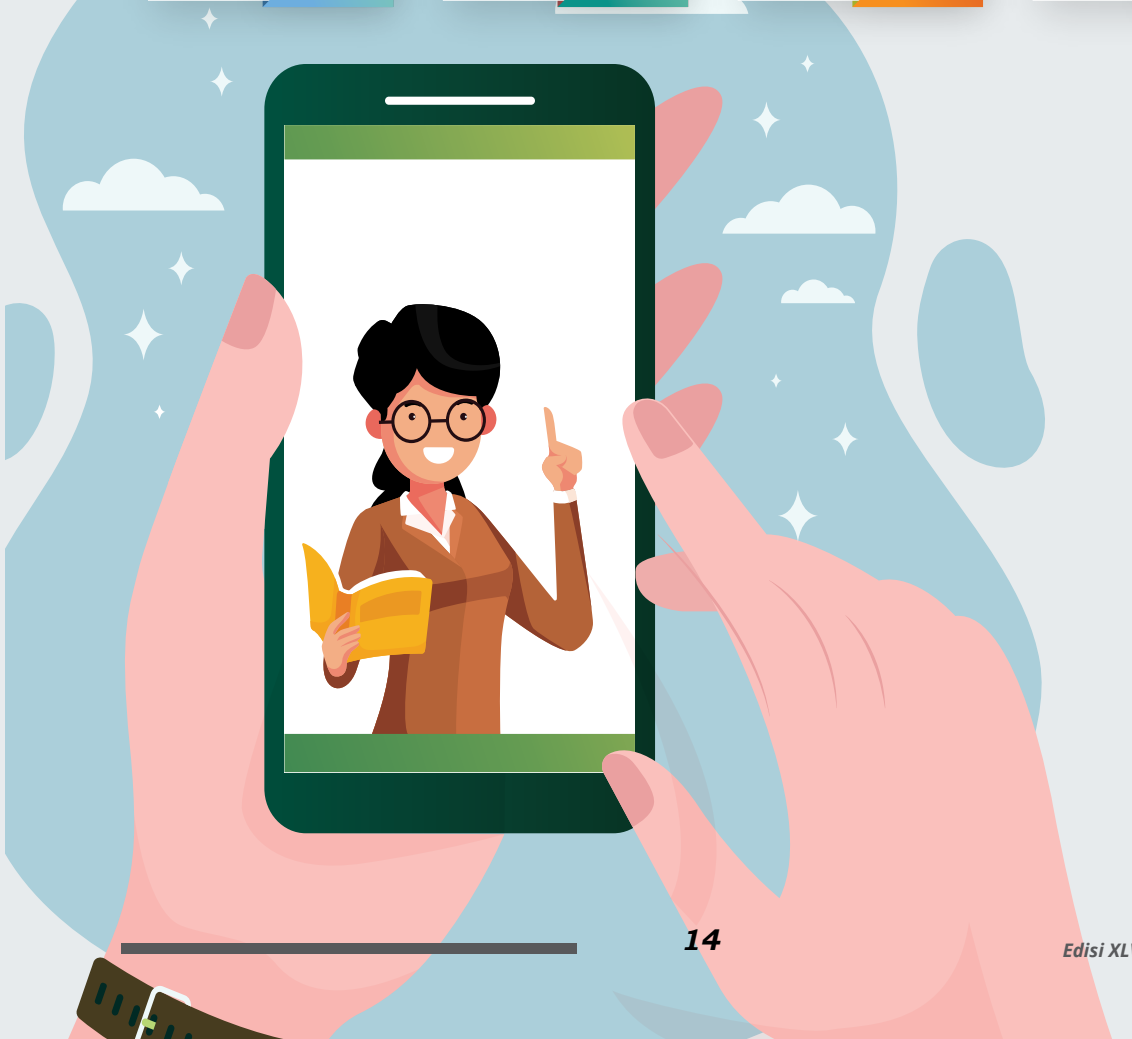

Asistensi fiskal diberikan kepada 60 juta siswa untuk pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Tentunya asistensi ini sangat bermanfaat. Apalagi Menteri Nadiem sudah mengatur alokasi pemanfaatannya dengan baik. Saya kira ini keputusan yang baik sekali

– Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate

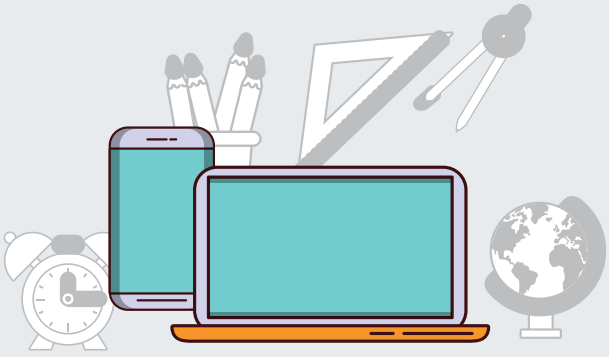

FOTO: Simon Dodit YP, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud.

Target penerima bantuan kuota internet ini sebanyak 50,7 juta peserta didik, 3,4 juta pendidik, 5,1 juta mahasiswa, dan 257 ribu dosen. Bantuan ini disalurkan langsung ke nomor-nomor ponsel yang telah terdaftar pada Dapodik dan PDDikti bukan dalam bentuk nomor baru atau nomor perdana. Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran yang tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor perdana, dapat dipastikan hal tersebut bukan bantuan resmi dari Kemendikbud.

Hasan juga menambahkan bahwa Kemendikbud membuka masukan dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait daftar aplikasi pembelajaran pada laman Kuota Belajar (kuota-belajar.kemdikbud.go.id). "Kolaborasi dan sinergi sudah selayaknya dilaksanakan semua pihak, terutama pada masa krisis ini. Segala ikhtiar terus kami lakukan demi menjaga nyala api peserta didik", tutur Hasan.

Di sisi lain menurut Santi Kusuma Dewi, guru SMP Islam Baitul Izzah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 sangat memberikan manfaat dan kemudahan. "Saya sangat senang sekali kalau pemerintah sudah berupaya untuk memberikan fasilitas, berarti kita sebagai guru juga harus memperbaiki kualitas kita dalam pembelajaran," katanya.

Sementara itu, Gita Kobandaha, orang tua dari Keyra Divia yang merupakan siswa SD Negeri 1 Tanoyan Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, mengatakan biasanya anak-anaknya cuma bisa pinjam kuota selama PJJ. "Jadi kalau kami dapat bantuan itu alhamdulillah bersyukur karena termasuk di sini ekonomi daerahnya masih rendah," ujarnya.

Ada juga Harris Munandar, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat yang menyampaikan bahwa jumlah kuota yang habis digunakan untuk PJJ seperti satu *video conference* bisa menghabiskan hampir 1 gigabyte. "Saya di perbatasan, ada yang belum mendapatkan infrastruktur sinyal, apalagi di dekat perbatasan Malaysia sangat sulit mendapatkan sinyal, harus di satu tempat. Tapi secara keseluruhan, sangat membantu, apalagi saya mahasiswa yang tugasnya sangat banyak. Terima kasih, Mas Menteri," jelasnya. **(ABG)**

Proses Penyaluran Bantuan Kuota Belajar

Lewati Mekanisme, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel

Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan pendidik. Sejumlah proses harus dilalui sebelum para penerima bantuan menerima dan memanfaatkan kuota belajar tersebut. Redaksi merangkum prosesnya dalam artikel berikut ini.

Sebelum menerima bantuan kuota belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan sejumlah proses untuk memastikan penerima memenuhi persyaratan.

Sementara untuk proses penyalurannya sendiri melewati sejumlah tahap. Dimulai dari melakukan mekanisme penyiapan data awal, dilanjutkan dengan verifikasi, dan validasi data nomor ponsel.

Adapun persyaratan penerima bantuan ini adalah peserta didik dan tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berstatus aktif serta memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/pendidik/orang tua/anggota keluarga/wali.

Sementara itu, untuk mahasiswa harus terdaftar di aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*, memiliki Kartu rencana studi pada semester berjalan, serta tentunya memiliki nomor ponsel aktif. Demikian juga dengan dosen harus terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021, memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP), dan memiliki nomor ponsel aktif.

FOTO: Kusnadi, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud.

Penerima bantuan ini adalah peserta didik dan tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berstatus aktif serta memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/pendidik/orang tua/anggota keluarga/wali.

Selanjutnya, Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di aplikasi Dapodik. Selain itu, operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id) agar dapat menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.

Begitu juga dengan Perguruan tinggi, wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id). Selanjutnya, pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Tarik Data

Untuk proses verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kemendikbud mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari

FOTO: Dana Amalia Sekar Arum, Dok. Lomba Foto 2020 Kemendikbud.

aplikasi Dapodik dan PDDikti. Operator seluler selanjutnya menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.

Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi nomor identitas peserta didik, tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen sebagai kode unik, SDM ID sebagai kode unik dosen, jenjang pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), kode perguruan tinggi, nama sekolah, nama perguruan tinggi, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nomor ponsel. Dari variabel data tersebut, operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.

Tahap selanjutnya, operator seluler mengirimkan hasil verifikasi dan validasi ke Pusdatin dengan kelompok nomor ponsel aktif, nomor ponsel tidak aktif, dan nomor ponsel tidak ditemukan.

Langkah selanjutnya, pengelola satuan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi, harus mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke dalam aplikasi verifikasi validasi (https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id) untuk jenjang PAUD dan Dikdasmen serta https://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang Perguruan Tinggi.

Untuk mengetahui nomor ponsel yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi kebenarannya, pengelola satuan pendidikan dapat memperolehnya pada aplikasi verifikasi validasi, kemudian dibuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif

SPTJM merupakan surat pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kepala Sekolah yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh data nomor ponsel peserta didik dalam satuan pendidikan yang dipimpinnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi kebenarannya.

Untuk mengetahui nomor ponsel yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi kebenarannya, pengelola satuan pendidikan dapat memperolehnya pada aplikasi verifikasi validasi, kemudian dibuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif. Operator Dinas Pendidikan/Lembaga Layanan

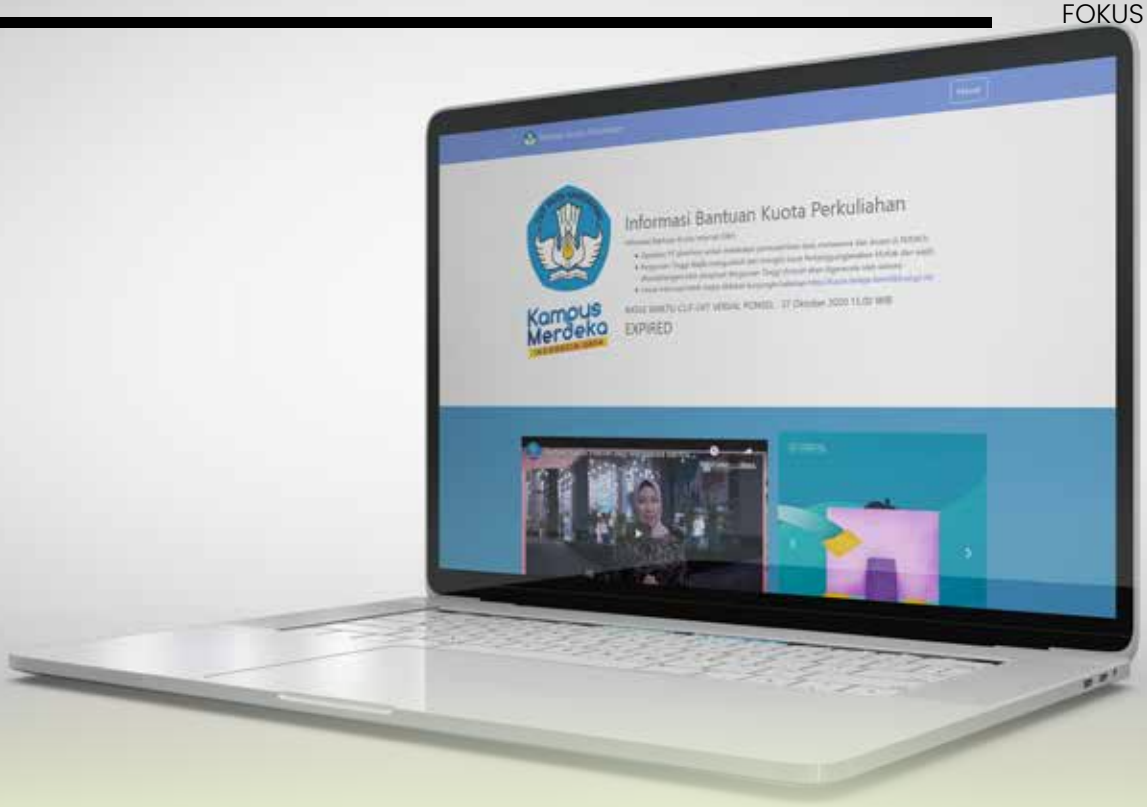

Pendidikan Tinggi (LLDikti) memonitor satuan pendidikan/Perguruan Tinggi yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/ Perguruan Tinggi tersebut untuk mengunggah SPTJM. Selanjutnya, Pusdatin melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/Perguruan Tinggi.

Pemutakhiran

Langkah terakhir adalah pemutakhiran nomor ponsel. Untuk PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, operator Satuan Pendidikan dapat melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id. Sementara itu, untuk jenjang Perguruan Tinggi dapat melakukan pemutakhiran melalui https://pddikti.kemdikbud.go.id.

Selanjutnya, pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah/pemimpin Perguruan Tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan dan diunggah ke dalam aplikasi verifikasi validasi. Operator Dinas Pendidikan dan LLDIKTI memonitor Satuan Pendidikan/Perguruan TInggi yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan dan menghimbau Satuan Pendidikan/Perguruan Tinggi tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.

Pusdatin melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM pada Satuan Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan. Sementara itu, pengelola PDDikti Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan pengecekan/ pemeriksaan SPTJM pada Perguruan Tinggi untuk data yang dimutakhirkan.

Pengunggahan SPTJM untuk pemutakhiran nomor ponsel dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya. Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM mulai menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya. **(DNS)**

Pertanyaan Seputar Program Bantuan Kuota Belajar

Apa yang Harus Saya Lakukan?

Program bantuan kuota internet tahun 2020 telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada September 2020. Penyaluran bantuan di bulan pertama tersebut telah menjangkau 27,8 pendidik dan peserta didik. Jumlah tersebut diyakini akan terus meningkat seiring dengan proses verifikasi dan validasi nomor ponsel yang didaftarkan. Lalu, bagaimana jika hingga penyaluran di bulan pertama telah selesai, namun penerima bantuan belum mendapatkan kuota internet? Cek masalahnya di sini dan temukan solusinya.

Apakah yang dimaksud dengan bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemdikbud?

Bantuan kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Bantuan kuota data internet seluler tersebut terdiri atas:

- Kuota Umum: Kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi
- Kuota Belajar: Kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Apa saja rincian bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?

Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori

yaitu sebagai berikut:

1. Peserta Didik Jenjang PAUD: 20 GB / bulan
   - » 5 GB Kuota Umum
   - » 15 GB Kuota Belajar
2. Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 35 GB / bulan
   - » 5 GB Kuota Umum
   - » 30 GB Kuota Belajar
3. Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 42 GB / bulan
   - » 5 GB Kuota Umum
   - » 37 GB Kuota Belajar
4. Dosen dan Mahasiswa: 50 GB / bulan
   - » 5 GB Kuota Umum
   - » 45 GB Kuota Belajar

Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. mahasiswa; dan
4. dosen.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
    - » Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
    - » Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
    - » Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
    - » Memiliki nomor ponsel aktif.
3. Mahasiswa
    - » Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*;
    - » Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
    - » Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen
    - » Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
    - » Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
    - » Memiliki nomor ponsel aktif.

Di mana saya bisa mendapatkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar?

Daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar dapat dilihat melalui laman ***https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/*** dan akan diperbarui secara berkala.

Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:

a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
    1. tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
    2. tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
    1. tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
    2. tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
    1. tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
    2. tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?

Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:

- bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan keduaberlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
- bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?

Ya, setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri?

Program ini dapat disalurkan melalui nomor ponsel orangtua atau wali yang terdaftar, sehingga siswa tetap mendapatkan manfaat. Pastikan nomor ponsel orangtua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah.

Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?

Proses entri dan verval tetap bisa dilanjutkan

walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada dua tahap untuk entri maupun verifikasi dan validasi datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua.

Namun apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya.

Apa tahap selanjutnya jika sudah melewati batas akhir verifikasi dan validasi untuk data ponsel?

Sesuai tahapan proses adalah verifikasi dan validasi (verval), dilengkapi dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Sekolah, Rektor atau yang mewakili, dan unggah SPTJM tersebut melalui **https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id**

Setelah nomor terverifikasi, apakah kuota otomatis terisi atau tetap harus mengaktifkan lagi?

Nomor yang sudah terverifikasi dan masuk ke dalam daftar nomor dalam SPTJM yang ditandatangani Kepala Sekolah, selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para provider penyedia jasa kuota data internet untuk diisikan paket kuota data ke dalam nomor tersebut.

Jika data entri kuota belum 100%, apakah akan diperpanjang lagi atau ada strategi lain? Karena bantuan ini untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

Entri data dan verval akan tetap dilanjutkan. Jika dari hasil entri data dan verval ada yang belum terdata, maka akan diikutkan pada periode selanjutnya (28 September 2020), dengan sasaran untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

Bagaimana jika nomor siswa yang didaftarkan, ada nomor yang tidak aktif?

Jika hasil dari pemadanan data dengan provider didapatkan ada nomor-nomor yang tidak aktif, hal ini mungkin terjadi karena banyak pengguna yang sering berganti nomer hanya untuk mencari alternatif paket-paket kuota data yang terjangkau oleh daya beli mereka.

Sehingga dimungkinkan nomor yang masuk sudah habis masa tenggang atau tidak aktif. Untuk itu disarankan agar pengguna menggunakan nomor yang sudah dipastikan aktif pada saat didaftarkan nomor ponselnya.

Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?

Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.

Apakah orangtua yang mendaftarkan 1 nomor ponsel yang sama untuk 3 anaknya yang bersekolah tetap mendapatkan bantuan kuota belajar untuk ketiga anaknya?

Selama nomor ponsel orangtua didaftarkan untuk ketiga anaknya, maka bantuan bagi tiga anak ini akan disalurkan kepada nomor ponsel tersebut.

Saya tidak diminta oleh sekolah untuk mendaftarkan nomor ponsel, tetapi saya mendapat bantuan ini. Mengapa?

Itu berarti nomor ponsel tersebut telah terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai nomor kontak peserta didik pada sekolah tersebut.

Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?.

1. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program kuota belajar.
2. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program kuota belajar.

Setelah melapor ke sekolah atau kampus, kapan saya mendapatkan bantuan kuota tersebut?

Setelah proses verifikasi dan validasi nomor ponsel dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi.

Bagaimana mengetahui nomor ponsel saya telah terdaftar dan dinyatakan aktif?

Silakan menghubungi operator sekolah atau operator kampus untuk memastikan bahwa nomor ponsel yang didaftarkan atas nama peserta didik tersebut terdaftar dan aktif.

Apakah bantuan kuota internet hanya untuk PTN dan PTS?

Bantuan kuota internet diberikan kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apa saja provider yang bekerja sama dengan bantuan kuota internet?

Telkomsel, Indosat, Tri, Axis, XL Axiata (XL dan Axis) dan Smartfren.

Kapan bantuan kuota akan didapatkan oleh mahasiswa dan dosen?

Bantuan kuota akan diberikan setelah perguruan tinggi menyelesaikan proses pengajuan.Perguruan tinggi dapat mulai melakukan proses pengajuan pada 15 September 2020.

Apakah perguruan tinggi akan mendapatkan laporan mahasiswa/dosen mana saja yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet?

Perguruan tinggi dapat melihat rekap mahasiswa dan dosen yang nomornya berhasil dilakukan injeksi bantuan kuota pada laman **kuotadikti.kemdikbud.go.id**

Apakah mahasiswa/dosen dapat melihat status nomor ponsel yang didaftarkan oleh kampus?

Mahasiswa/dosen dapat melihat data nomor ponsel yang terdaftar pada laman **pddikti.kemdikbud.go.id**

Bagaimana jika perguruan tinggi melakukan kesalahan pengisian nomor ponsel mahasiswa/dosen?

Pengelola PDDikti perguruan tinggi dapat melihat daftar mahasiswa dan dosen dengan nomor ponsel yang tidak valid/belum terisi pada laman **pddikti-admin.kemdikbud.go.id**. Perbaikan data mahasiswa dapat dilakukan melalui PDDikti *Feeder*. Perbaikan data dosen dapat dilakukan melalui laman **pddikti-admin.kemdikbud.go.id** di tab Kelengkapan Data Dosen pada halaman awal.

Apakah nomor pascabayar mendapatkan bantuan kuota juga? Apa yang akan didapat? Dan apakah penambahan kuota internet atau potongan tagihan?

Nomor pascabayar mendapat bantuan berupa penambahan kuota ke nomor tersebut.

Mahasiswa/dosen menggunakan internet berlangganan (fixed line), apakah akan mendapatkan bantuan kuota juga?

Nomor pascabayar mendapat bantuan berupa penambahan kuota ke nomor tersebut.

Apakah nomor yang diinput ke PDDIKTI boleh nomor ponsel baru?

Nomor ponsel yang didaftarkan bisa menggunakan nomor baru.

Apakah mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel?

Setelah mendapat bantuan kuota, mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel terdaftar untuk bantuan kuota pada bulan berikutnya.

Bantuan yang saya terima bisa digunakan untuk apa saja?

Bantuan kuota internet untuk mahasiswa/dosen sebesar 50 GB dengan pembagian kuota bebas dan kuota belajar (Detil pembagian akan segera difinalkan). Kuota belajar dapat digunakan untuk mengakses Sistem Manajemen Pembelajaran yang digunakan oleh perguruan tinggi, aplikasi kelas daring, video conference, dan situs pendidikan lainnya.

Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?

Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud **http://ult.kemdikbud.go.id** atau posel: **pengaduan@kemdikbud.go.id.**

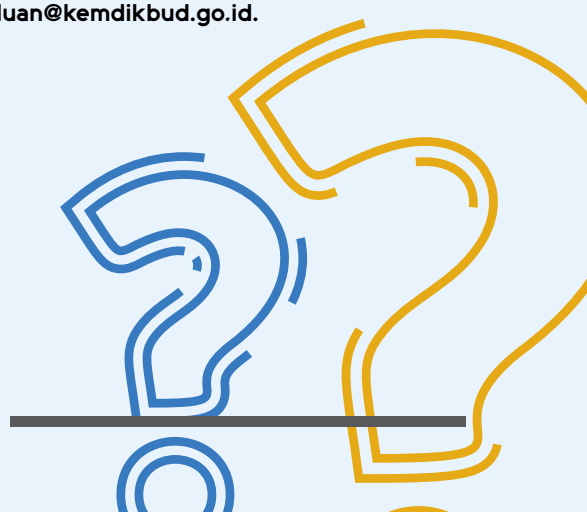

Kesaksian Para Penerima Bantuan

Menikmati Teknologi Tanpa Khawatir Mahalnya Biaya Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu menerbitkan kebijakan untuk memberikan bantuan kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Hal tersebut sebagai komitmen Kemendikbud membantu stakeholder pendidikan melakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) di masa pandemi COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020, secara virtual, pada Jumat lalu (24/09). Peresmian disaksikan langsung secara virtual oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan para Direksi operator seluler yang ada di Indonesia yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, AXIS, 3 (Tri), dan Smartfren.

Terlaksananya kebijakan ini adalah hasil koordinasi antara Kemendikbud dengan pemangku kepentingan lainnya yakni Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kebijakan ini mengatur, bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah adalah kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran sesuai daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Alokasi kuota yang diberikan untuk peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, sedangkan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapat 35

GB/bulan. Bagi pendidik jenjang PAUD serta pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB/bulan. Sementara untuk mahasiswa dan dosen mendapat 50 GB/bulan. Pengalokasian kuotanya apatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.

Mendikbud mengatakan, kuota internet dibagikan merata kepada seluruh pendidik dan peserta didik yang telah terdaftar. Para orang tua siswa pun tidak perlu khawatir jika anak-anak mereka belum mendapatkan bantuan kuota, karena proses verifikasi dan validasi terus berjalan sehingga tidak ada ketentuan batas akhir pelaporan. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan kuota data internet juga terus berlangsung secara bertahap.

Kemendikbud merangkum berbagai testimoni masyarakat yang telah mendapat bantuan kuota belajar. Rangkuman kesaksian mereka diperoleh dari kanal media sosial Kemendikbud, hasil kunjungan kerja, kutipan wawancara peserta didik maupun tenaga pendidikan hingga tanggapan Anggota Komisi X DPR RI.

Berikut beberapa unggahan testimoni warganet yang diambil dari media sosial Kemendikbud. "Alhamdulillah akhirnya dapat juga nih kuota Kemendikbud," tulis Akun @gilangmfg sambil mengunggah tangkapan layar (*screenshot*) kuota yang telah masuk ke ponselnya.

Akun @dsfuyee menulis cuitan, "Makasih ya Pak @jokowi dan Pak Nadiem atas bantuan kuotanya. Saya sebagai mahasiswa sangat terbantu dengan upaya bapak dalam menangani efek Covid-19 di bidang pendidikan. Terlepas dari semua yang ngehujat Pak Jokowi, saya justru bangga bapak sebagai Presiden Indonesia."

"*Is this for real*? thanks Pak Menteri Kemendikbud dan jajarannya. *y'all help me when i need y'all the most*," tulis Akun @bavvarois.

Tak ketinggalan akun @salsarzqt memuat status: "Terima kasih Kemdikbud, terharu hamba," sambil mengirim tangkapan layar kuota yang telah masuk ke ponselnya.

Tak hanya itu, dalam kunjungan kerja, Kemendikbud mendapat tanggapan positif dari siswa, guru, mahasiswa dan dosen yang telah menerima bantuan kuota belajar. Di antaranya adalah Santi Kusuma Dewi, guru SMP Islam Baitul Izzah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Menurut Santi, perbedaan yang luar biasa ia rasakan adalah kalau dahulu sebelum ada bantuan dari pemerintah, siswa mengalami kesulitan karena mahalnya kuota yang harus mereka beli ditambah infrastruktur yang tidak memadai.

"Saya di sini merasa mendapatkan kenikmatan menggunakan teknologi dalam pembelajaran tapi setelah mendengar Pak Erick (Menteri BUMN) menjelaskan bahwa kita sedang berjuang untuk memperbaiki infrastruktur agar seluruh pelosok negeri di Indonesia mendapatkan internet yang sama itu seperti mimpi yang jadi nyata. Saya sangat senang sekali kalau pemerintah sudah berupaya untuk memberikan fasilitas berarti kita sebagai guru juga harus memperbaiki kualitas kita dalam pembelajaran," kata Santi.

Selanjutnya, Gita Kobandaha selaku perwakilan orang tua SD Negeri 1 Tanoyan Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara turut menyampaikan tanggapannya. Wali dari siswa yang bernama Keyra Divia itu mengaku senang dengan bantuan kuota belajar. "Yang pertama dipakai untuk belajar, Pak, karena di sini PJJ-nya pakai jaringan. Jadi, kalau kami dapat bantuan itu alhamdulillah bersyukur karena termasuk di sini ekonomi daerahnya masih rendah. Jadi kasihan Pak kalau teman-teman atau anak-anak biasanya cuma pinjam kuota," ujarnya.

Menanggapi bantuan kuota belajar dari Kemendikbud ini, siswa SMAN 14 Bekasi, Mada Bayu Wijaya merasa terbantu. "Saya gunakan untuk mengakses Google Classroom (GCR), Whatsapp, dan video konferensi," ungkap siswa kelas XI IPA 2 itu.

"Tolong agar kualitas jaringan juga diperhatikan supaya proses pembelajaran berlangsung maksimal," imbuhnya.

Melengkapi komentar sebelumnya, Direktur Sekolah Sukma Bangsa, Pidie, Marthunis menyebut guru-guru di Sekolah Sukma Bangsa, Pidie, merasa senang karena mereka hanya menunggu sekitar satu minggu untuk menerima bantuan kuota setelah proses verifikasi dan validasi data. Selain itu, jaringan di daerahnya juga tidak mengalami banyak kendala.

"Kuota yang diberikan cukup namun sebaiknya alokasi kuota umum ditambah dengan perbandingan antara kuota umum dan kuota belajar yaitu 40:60 karena banyak bahan ajar dari selain yang terdapat dalam list kuota belajar yang digunakan untuk menarik minat belajar siswa," disampaikan Marthunis.

Berikutnya Irham, Guru SMAN 11 Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang berkisah untuk mencari sinyal terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran daring. "Di desa kami agak susah (sinyal), namun ada titik tertentu yang dapat sinyal 4G. Jadi harus mencari sinyal dulu baru bisa belajar," ungkapnya.

Ketika ditanya pendapatnya tentang pembagian kuota belajar dari Kemendikbud, ia mengaku senang. Ditambah, sekolahnya cepat melakukan pendataan sehingga siswa dan guru dapat segera memanfaatkan kuota tersebut. "Relatif tidak ada kendala," imbuhnya.

Meski termasuk daerah terpencil, sekolahnya melakukan pembelajaran daring selama pandemi. Guru-guru ke sekolah melakukan pembelajaran daring yang diatur dalam sistem piket. "Kami menggunakan *Google Meet* untuk penjelasan materi, untuk tugas dan materi, kami menggunakan *Whatsapp* (WA) dan *Google Form*," terang Irham.

Lebih lanjut Irham mengatakan, kuota yang diberikan Kemendikbud untuk aplikasi pembelajaran lebih dari cukup, malah cenderung berlebihan. Ia berharap ada penambahan untuk porsi kuota umum. "*Youtube* sangat membantu proses pembelajaran daring karena banyak materi pembelajaran dari situ. (materi) Lebih lengkap dan terbaru kalua dari *Youtube*," urainya.

Irham menilai, kebijakan Kemendikbud di masa pandemi COVID-19 sudah baik. Ada pelatihan guru, relaksasi dana BOS, hingga bantuan kuota internet. Namun begitu, untuk mencegah siswanya mengakses informasi yang tidak bermanfaat, di masa PJJ ini ia rajin mengimbau dan menasehati siswa agar bijaksana menggunakan kuota internet. "Harapannya siswa sadar untuk bijak dalam menggunakan kuota."

Dari jenjang perguruan tinggi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Harris Munandar menjabarkan alokasi kuota yang digunakanya selama PJJ. Dia mencontohkan satu kali *video conference* bisa menghabiskan hampir 1 GB. "Alhamdulillah dapat bantuan 50 GB dari Kemendikbud dan Tri memberikan 30+6 GB. Apalagi saya mahasiswa informatika. Alhamdulillah terbantu. Jadi *overall* sangat membantu."

Ia bercerita bahwa di wilayah perbatasan, masih ada yang belum mendapatkan infrastruktur sinyal, terutama di dekat perbatasan Malaysia. Sangat sulit katanya untuk mendapatkan sinyal sehingga harus

Mendikbud menegaskan, bantuan kuota internet dibagikan merata untuk pendidik dan peserta didik yang terdaftar. Kuota yang diterima dapat digunakan untuk membantu pembelajaran yang menggunakan internet dan diharapkan mampu mengurangi biaya pengeluaran untuk komponen ini

mencari tempat yang bagus jaringannya agar belajar daring. Namun secara keseluruhan, ia mengaku sangat terbantu dengan program ini. "Apalagi saya mahasiswa yang tugasnya sangat banyak. Terima kasih, Mas Menteri," jelasnya.

Di bagian lain, Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Anis Raharjo mengaku sangat terbantu dengan pemberian kuota belajar dari Kemendikbud. Anis yang menggunakan provider Telkomsel menyebut, hampir tidak ada kendala dalam jaringan selama proses pembelajaran. "Dosen saja terbantu apalagi mahasiswa," tuturnya.

Sejak sebulan lalu saat nomor ponselnya didaftarkan, Anis merasa kuota sebesar 50 GB yang ia dapatkan sudah mencukupi. Hanya saja, relevansi penggunaannya perlu dievaluasi. Ia mengatakan, sumber belajar yang digunakan dosen dan mahasiswa begitu beragam sehingga jika memungkinkan alokasi kuota umum diperbesar. "Selain video konferensi, kami sering mengakses Youtube, Instagram, dan aplikasi lainnya untuk memperkaya materi perkuliahan," ucap Anis yang biasanya menggunakan kuota untuk video konferensi selama satu jam di tiap kelas.

Besar harapan para pendidik, agar bantuan kuota internet untuk dosen dan mahasiswa terus berlanjut, setidaknya hingga pandemi Covid-19 berakhir.

Tak berbeda dari sebelumnya, Illiza Sa'aduddin Djamal, Anggota Komisi X DPR RI dari menyampaikan apresiasinya terkait bantuan kuota belajar yang digagas Kemendikbud. Langkah ini adalah solusi untuk menjawab tantangan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.

"Kebijakan ini bagus karena kuota itu sesuatu yang amat sangat akan dirasakan oleh masyarakat," kata perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Hal senada turut dikemukakan perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sofyan Tan. Ia menyampaikan apresiasi atas kebijakan Kemendikbud yang dinilai tepat karena dampak kebijakan ini langsung terasa bagi masyarakat. "Artinya Menteri mendengar keluhan orang tua, guru, dan siswa," ucapnya.

Mendikbud berpesan, jika pendidik dan peserta didik belum menerima bantuan, ia meminta agar segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan agar nomor ponselnya segera didaftarkan oleh operator sekolah melalui Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) bagi mahasiswa atau dosen. "Pastikan nomor ponsel yang didaftarkan sudah benar dan aktif," tutupnya. **(DLA)**

Agar Tepat Sasaran Tata Kelola Program Pulsa Gratis Perlu Ditingkatkan

Unifah Rasyidi

Pemerintah telah memberikan subsidi kuota gratis untuk murid, guru, mahasiswa dan dosen. Untuk guru sendiri akan mendapatkan bantuan sebesar 40 GB selama empat bulan, dimulai sejak September hingga Desember 2020. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rasyidi mengatakan, tata kelola pemberian kuota gratis perlu ditingkatkan agar tepat sasaran. Berikut petikan wawancara JENDELA dengan Unifah Rasyidi.

Apa evaluasi Anda terhadap program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini diterapkan selama masa pandemi Covid-19?

Kita semua tentu tidak pernah menduga adanya pandemi Covid-19 ini yang berdampak terhadap dunia pendidikan. Untuk menghindari penyebaran Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan program PJJ. Mengingat ini sesuatu yang baru, maka agar efektif program PJJ ini memerlukan dukungan dan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah seperti dukungan infrastruktur dasar (jaringan, BTS, listrik, kualitas *broadband* termasuk kuota internet).

Selain itu juga menyiapkan kurikulum darurat dengan capaian yang realistis, menyiapkan bahan ajar, baik disesuaikan dengan kurikulum yang telah disederhanakan dan didistribusikan sampai ke sekolah-sekolah terutama yang tidak mempunyai akses listrik dan internet, melatih guru mengenai pembelajaran PJJ secara massif, dan juga dukungan pendanaannya. Intinya, Kemendikbud harus memberdayakan dan memaksimalkan semua potensi sehingga program PJJ berlangsung efektif.

Untuk mengoptimalkan PJJ pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program bantuan kuota data internet pada akhir September ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebagai mitra Kemendikbud, sebenarnya PGRI yang paling awal mengusulkan program tersebut. Alhamdulillah usulan tersebut mendapat respons positif dari Kemendikbud. PGRI memberikan apresiasi atas kebijakan tersebut.

Beberapa waktu setelah disalurkan, program ini sempat menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Banyak yang menyampaikan apresiasi atas program ini. Menurut Anda apakah program ini merupakan program yang tepat untuk pendidik dan peserta didik?

Pada saat ini program pemberian pulsa gratis ini merupakan program yang baik dan sangat membantu pelaksanaan PJJ. Kami akan kawal efektivitas dan ketepatan sasaran bantuan ini seperti siapa saja yang berhak menerima bantuan. Bantuan harus menyeluruh kepada siswa, mahasiswa, honorer, guru, dosen sekolah/perguruan tinggi negeri dan swasta. Harus menyentuh rasa keadilan dan yang utama bahwa tujuan subsidi pulsa ini agar proses pembelajaran daring ini efektif.

Dengan mekanisme dan prosedur yang ada untuk memperoleh bantuan kuota internet, bagaimana mengawasi adanya penyimpangan dalam program ini apa yang harus dilakukan?

Pertama identifikasi data penerima subsidi pulsa, mekanisme bantuan dengan prosedur operasi

standar (POS) yang jelas, transparan, dan akuntabel serta melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah agar tepat sasaran dan jelas. Agar tidak bocor ke mana-mana, itu perlu data, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis),dan transparan.

Menurut Anda apa peran yang bisa diambil pemerintah daerah dalam program bantuan kuota gratis ini?

Pemerintah pusat harus membangun komunikasi yang efektif untuk mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah melaksanakan fungsi desentralisasi pendiidkan dengan optimal. Banyak praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah selama ini. Saya melihat contoh yang bagus misalnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur yang memprakarsai Kios Anjungan Belajar Mandiri (Kios ABM) untuk memudahkan siswa sekolah di Jatim mengikuti PJJ. Mesin ABM ini akan diutamakan didistribusikan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. Melalui mesin ABM tersebut, seluruh siswa dapat mengunduh soal dan materi pembelajaran yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga perlu koordinasi intensif lintas kementerian. Masing-masing kementerian harus berbagi tugas dengan baik sesuai tugas dan fungsinya. Yang perlu dilakukan Kemendikbud adalah memperbaiki komunikasi publik dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta.

Apa tantangan program kuota gratis bagi pendidik, peserta didik dan juga pemerintah?

Bagi pendidik dan tenaga pendidikan tantangannya adalah meningkatkan kapasitas mereka. Pemerintah harus memberdayakan tenaga pendidik agar kapasitas para tenaga pendidik dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan teknologi internet untuk kegiatan belajar dan mengajar dapat lebih meningkat. Sementara untuk pemerintah tantangannya adalah menyiapkan infrastruktur dasar seperti jaringan internet, listrik, BTS, dan sejenisnya yang lebih luas lagi sehingga tidak ada satupun sekolah atau wilayah yang tidak teraliri listrik dan sambungan internet; menyiapkan bahan ajar yang efektif serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif.

Terakhir, tantangan untuk peserta didik yaitu bagaimana capaian belajar siswa selama PJJ tidak berkurang jauh dari standar yang ditentukan, bagaimana PJJ dapat mendisiplinkan mereka untuk belajar, dan bagaimana karakter dapat dikembangkan dan yang relevan dengan bantuan kuota adalah bagaimana memanfaatkan kuota data internet ini dengan baik yaitu untuk keperluan belajar mereka.

Setelah tersalurkan di bulan pertama pada September lalu, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkannya?

Pertama, identifikasi target dan sasaran tenaga pendidik, dosen, siswa dan mahasiswa yang akan menerima kuota data. *Kedua*, membuat sistem monitoring penggunaan dan pemanfaatan bantuan kuota pulsa pembelajaran. Apakah memang benar-benar digunakan untuk proses belajar mengajar atau digunakan untuk keperluan yang lain. *Ketiga*, mendorong BUMN atau perusahaan swasta (provider) yang mendapat keuntungan berlimpah di tengah pandemi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh jaringan internet. Keempat, menyiapkan bahan materi ajar dan mensosialisasikannya secara *offline* maupun *online*.

Apa harapan Anda terhadap program bantuan kuota internet yang telah dilaksanakan oleh pemerintah?

Harapan saya sederhana dan tidak muluk-muluk. Semoga program bantuan kuota data internet ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa, mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan PJJ di tengah pandemi. Semoga ke depan program ini dapat lebih disempurnakan lagi dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini masih terlihat. **(*)**

Berpetualang Sambil Belajar Nilai Budaya Masa Lampau

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Slogan tersebut perlu ditanamkan kembali kepada peserta didik agar mau mempelajari sejarah dan nilai budayanya.
Salah satu upaya pemerintah dalam mengemas sejarah agar mudah dipahami adalah dengan program rumah peradaban.

Rumah peradaban adalah kegiatan pembelajaran, pencerdasan, pengayaan, dan pencerahan tentang nilai budaya di masa lampau guna membangun peradaban yang lebih maju. Salah satu hasil dari rumah peradaban yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara adalah buku yang berjudul *Berpetualang Ke Negeri Panai Padanglawas: Seri Buku Pengayaan karya Andri Restiyadi*.

Buku ini berisi hasil penelitian Balai Arkeologi Sumatera Utara di Kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas. Meskipun menyajikan hasil penelitian, buku ini mudah dimengerti pembaca karena menggunakan pemilihan kata yang sederhana dan disertai dengan ilustrasi menarik yang dapat memperjelas isi pembahasan.

Buku ini dilengkapi dengan fakta unik, kosakata baru, gagasan kreatif dan permainan yang dapat mendorong kreativitas anak. Koleksi ini terdiri dari 55 halaman dengan pembahasan yang runtut mulai dari pengenalan tentang Pulau Sumatra, letak Negeri Panai, tinggalan apa saja yang ada di Negeri Panai, kehidupan masyarakatnya hingga bagaimana kita menjaga peninggalan tersebut.

Deskripsi Fisik

Judul	: Berpetualang Ke Negeri Panai Padanglawas : Seri Buku Pengayaan
Penulis	: Andri Restiyadi
Tahun Terbit	: 2020
Halaman	: vii, 55 hlm.
Bahasa	: Indonesia
Sampul	: Sampul Lunak

Koleksi ini cocok untuk dibaca oleh siswa sekolah dasar, guru, dan orang tua murid. Pembaca tidak hanya disuguhkan dengan informasi-informasi sejarah dan nilai budaya, tetapi juga bisa ikut berinteraksi karena terdapat lembar kreativitas yang dapat dilakukan oleh pembaca khususnya anak-anak. Selain mendapatkan wawasan baru tentang peninggalan di masa lalu, geografi, dan kesenian, buku ini juga dapat meningkatkan kreativitas anak. Tidak hanya itu, melalui buku ini anak-anak juga ditanamkan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dan religius.

Buku ini dapat dibaca secara daring atau luring dengan mengunduhnya terlebih dahulu. Informasi selengkapnya, kunjungi http://repositori.kemdikbud.go.id/19352/ atau pindai kode QR berikut. **(RWT)**

Ayo Unduh Eperpusdikbud

Baca dan Nikmati Ribuan Koleksi Bahan Bacaan, Gratis!

Eperpusdikbud merupakan aplikasi yang berisi koleksi elektronik bidang pendidikan dan kebudayaan. EPerpusdikbud memiliki ribuan koleksi buku elektronik (e-book) yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca buku elektronik dengan nyaman. Pilih kategori buku yang sesuai dan temukan judul favorit yang kamu inginkan. Pinjam dan baca koleksinya hanya dengan menggunakan ponsel pintarmu, di mana saja, kapan saja dan tak terbatas.

Cara peminjaman koleksi Eperpusdikbud :

1. Unduh aplikasi di play store atau app store
2. Pendaftaran pada menu register dan verifikasi pos-el
3. Pencarian dan pilih buku yang akan dipinjam
4. Tekan tombol pinjam, otomatis aplikasi akan mengunduh dan koleksi siap dibaca

Eperpusdikbud dapat di unduh di:

Google Play

App Store

(RWT)

Guru-Guru Gokil

Aksi Kompak Guru Lawan Perampok

Apa yang ada di benak ketika pertama kali mendengar judul film Guru-Guru Gokil (GGG)? Sosok guru yang lucu atau seru? Dengan memegang status sebagai film orisinal Netflix dari Indonesia, penonton tentu saja boleh berekspektasi lebih terhadap film ini. Namun, untuk menjawab seberapa gokil (gila) guru di film ini, jawabannya tidak terdapat pada masing-masing karakter, tetapi pada aksi bersama mereka untuk melawan perampok.

Sosok utama yang diangkat dalam Film GGG adalah Taat Pribadi, (Gading Marten) yang suka uang dan ingin menjadi kaya raya. Ia juga ingin lepas dari bayang-bayang sang ayah yang merupakan guru favorit di sekolah. Oleh karena itu, Taat memutuskan untuk pergi ke kota dan mencoba pekerjaan apa saja untuk mendapatkan uang. Saat peruntungannya di kota habis, ia pun kembali ke rumah ayahnya di desa.

Sempat kebingungan harus bekerja apa, Taat kemudian pergi ke penyalur tenaga kerja untuk melamar pekerjaan. Alih-alih bisa bekerja di kapal pesiar, Taat justru disalurkan oleh agen ke SMA tempat ia bersekolah dulu. Ia diminta menjadi guru pengganti untuk mata pelajaran Sejarah. Beban tersendiri dirasakan karena sang ayah juga mengajar di tempat yang sama.

Belum cukup waktu penonton diajak mendalami karakter Taat sebagai seorang guru, petualangan Taat pun dimulai. Taat menghadapi tantangan ketika gaji guru-guru dirampok. Ia harus mendapatkan kembali uang gaji tersebut. Aksinya dibantu oleh Rahayu (Faradina Mufti), Pak Manulang (Boris Bokir), dan Nirmala (Dian Sastrowardoyo). Meskipun kelihatannya Pak Taat memiliki niat murni, tetapi sesungguhnya ia sempat galau dan berpikir untuk membawa kabur gaji guru-guru tersebut.

GGG cukup memberikan gambaran akan keadaan sekolah dan guru di daerah. Permasalahan yang terjadi seperti terlambat cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kurangnya

GGG cukup memberikan gambaran akan keadaan sekolah dan guru di daerah. Permasalahan yang terjadi seperti terlambat cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kurangnya jumlah guru, hingga guru melakukan pekerjaan sampingan demi mendapat uang tambahan memang bagian dari realita. Namun, seberapa berat pun permasalahan, para guru tetap mengajar.

Bu Nirmala dengan kepolosannya, Pak Manulang dengan kesetiakawanannya, dan Bu Indah (Asri Welas) dengan keculasannya.

Sebagai sebuah film, GGG seakan membawa kita pada nostalgia masa sekolah. Tentu saja film ini dapat menjadi pilihan tontonan bersama keluarga. GGG sudah tayang di Netflix mulai 17 Agustus 2020. **(PPS)**

jumlah guru, hingga guru melakukan pekerjaan sampingan demi mendapat uang tambahan memang bagian dari realita. Namun, seberapa berat pun permasalahan, para guru tetap mengajar.

Sebagai film bergenre drama komedi, tidak ada kegokilan yang membuat penonton tertawa terbahak-bahak dalam GGG. Namun, aksi bersama para guru dalam upaya merebut kembali gaji yang dirampok menjadi kegilaan tersendiri. Entah mengapa mereka nekat melakukan hal tersebut, padahal biasanya kasus seperti ini cukup diserahkan penangannnya kepada pihak berwajib.

Di satu sisi, cukup seru dan mengharukan melihat murid dan guru saling membantu untuk menghadapi perampok. Dengan catatatan, karena ada napas komedi dalam GGG. Tidak terbayang jika GGG merupakan drama aksi, betapa mengerikannya guru dan murid harus menghadapi segerombolan perampok.

Dari GGG kita belajar bahwa di luar tugasnya untuk mengajar, sosok guru juga manusia yang punya berbagai permasalahan dan cara mengatasinya. Kita pun diajak untuk lebih menghargai profesi guru. Dari masing-masing karakter guru pun kita bisa berkaca, Pak Taat dengan akalnya, Bu Rahayu dengan kecerdikannya,

Sutradara	Sammaria Simanjuntak
Produser	Dian Sastrowardoyo Shanty Harmayn Aoura Lovenson Chandra Tanya Yuson
Skenario	Rahabi Mandra
Cerita	Tanya Yuson
Pemeran	Gading Marten Dian Sastrowardoyo Faradina Mufti Boris Bokir Kevin Ardilova
Musik	Aghi Narottama Bemby Gusti Tony Merle
Sinematografi	Muhammad Firdaus
Penyunting	Dinda Amanda
Perusahaan produksi	BASE Entertainment
Distributor	Netflix Originals
Tanggal rilis	17 Agustus 2020
Durasi	101 menit
Negara	Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berkomitmen terhadap
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(ZI-WBK)

Ruang Dialog dan Ekspresi Pemajuan Kebudayaan

PKN Kembali Digelar untuk Kedua Kalinya

Kongres Kebudayaan Indonesia pada 2018 telah menghasilkan sebuah resolusi penting yakni penyelenggaraan *event* kebudayaan bertaraf nasional sebagai ruang dialog dan ekspresi pemajuan kebudayaan. Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) yang diselenggarakan pertama kalinya pada 7-11 Oktober 2019 adalah langkah konkret dari resolusi tersebut. Tahun 2020, PKN kembali diselenggarakan

Pekan Kebudayaan Nasional 2020

FOTO: www.pkn.id

PKN adalah upaya negara dan masyarakat di dalam membangun wadah kerja bersama untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar-budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang dari desa hingga ke ibu kota. Di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi ekosistem kebudayaan sebagai garda terdepan dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.

Istora GBK Senayan, Jakarta menjadi saksi digelarnya 10 kompetisi, 36 sesi konferensi, 125 pertunjukan, 27 pameran, dan 10 *workshop* budaya pada PKN yang pertama. Antusiasme masyarakat tampak pada jumlah pengunjung yang tercatat sekitar 250 ribu orang.

Tak bisa tidak, bercermin dari capaian tersebut, PKN mesti dilaksanakan setiap tahun. Maka, tak berapa lama selepas penyelenggaraannya yang pertama, diskusi dengan pelbagai pihak perihal PKN 2020 pun diadakan. Hasilnya, rancangan umum PKN 2020.

Situasi pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali pula kebudayaan. Namun demikian, situasi itu pun menyediakan wilayah refleksi dan inovasi. Melihat kondisi yang demikian dan dengan tekad bahwa kebudayaan mesti tetap berdenyut untuk menjaga kesehatan jiwa masyarakat membawa PKN 2020 mengambil bentuk penyelenggaraan dengan format dalam jaringan (*online*).

Tradisi Budaya Nusantara

Tema yang diangkat PKN 2020 berangkat dari kondisi Covid-19 yang membawa tantangan sekaligus juga wilayah refleksi serta inovasi tersebut. Situasi ini seakan dipertemukan pada khazanah kekayaan budaya nusantara. Protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan WHO memiliki banyak kaitan dengan akar tradisi sehat di nusantara. Tradisi mencuci tangan, tradisi tolak bala, tradisi mengisolasi diri, tradisi bersih desa, semuanya mengajarkan tentang relasi manusia dengan alam dan pengaruhnya kemudian pada kesehatan dan kekuatan tubuh manusia dan lingkungan sosialnya.

Relasi itu pula yang melahirkan macam-macam pengetahuan tentang bagaimana mengolah, merawat, dan memuliakan alam dan sang Pencipta. Dari sana lahir kemudian ragam pangan dan pengolahan pangan, ragam pakaian dari ilmu simpul-ikat serat-serat tanaman, ragam bangunan dan sarana transportasi, sampai dengan ragam ekspresi artistik. Singkatnya, semua yang diwariskan oleh nenek-moyang kita ditujukan untuk menyehatkan, memperkuat, dan akhirnya menjaga keseimbangan serta memuliakan manusia dan alam.

Maka, PKN 2020 diselenggarakan di bawah Tema Utama “Ruang Bersama Indonesia Bahagia”

FOTO: www.pkn.id

dengan narasi yang menekankan pada "penguatan tubuh dalam perspektif kebudayaan" (*Culture Resilience*). Di bawah tema ini, PKN 2020 hendak memberikan ruang ekpresi seni dan budaya kepada masyarakat serta sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi Covid-19.

Upaya gigih menyelenggarakan *event* ini adalah juga bukti keberpihakan kepada seniman dan pekerja seni di dalam keadaan yang penuh kemungkinan baru, penuh kenormalan baru ini. Dan dengan diselenggarakannya secara daring, PKN 2020 hendak memberikan tolok ukur kinerja dan kualitas kegiatan ekpresi seni dan budaya melalui daring.

Tema serta tujuan-tujuan tersebut diturunkan pada empat program utama mencakup kompetisi, konferensi, pameran, dan pergelaran. Mengingat keluasan lingkup kebudayaan Indonesia yang berdenyut hari ini (mulai dari tradisi hingga kontemporer, mulai dari bertujuan religius hingga hiburan waktu senggang) dan kekayaan budaya Indonesia (yang merentang dari Sabang sampai Merauke, dari Sangirtalaut hingga Rote) maka tak heran jika PKN 2020 adalah sebuah perhelatan kebudayaan secara daring terbesar di dunia. Setidaknya ada sebanyak 4.791 seniman dan pekerja seni akan terlibat, menghadirkan 27 tema konferensi dan 93 pergelaran, 1.477 karya seni visual dipamerkan.

Seluruh rangkaian perhelatan PKN 2020 diselenggarakan pada 31 Oktober – 30 November 2020. Agenda kompetisi, konferensi, pameran, dan pergelaran dapat disaksikan melalui laman pkn.id.

Tidak hanya itu, PKN juga menghadirkan pasar yang diberi nama PASARBUDAYA. Pasar ini menyuguhkan ragam produk budaya Indonesia yang dijual melalui platform digital bekerja sama dengan salah satu lokapasar besar di Indonesia. PASARBUDAYA menjual karya-karya yang terdapat dalam daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, seperti batik, miniature kapal pinisi, dan aneka kuliner Indonesia.

Untuk memberi nilai tambah, setiap produk yang dipasarkan melalui PASARBUDAYA dilengkapi dengan narasi, deskripsi filosofi, makna motif dan bentuk, sejarah, serta proses dan cara pembuatannya. Selain untuk mendukung perkembangan produk budaya Indonesia yang sangat potensial, PASARBUDAYA juga hadir untuk membantu pekerja seni secara ekonomi sehingga dapat menjual produknya di tengah pandemi, tidak hanya skala nasional maupun internasional. **(ALN/Direktorat Jenderal Kebudayaan)**

Kemampuan Literasi Finansial dan Literasi Digital pada Keluarga Pekerja Migran

Oleh: Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni
Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Malang

Gerakan Literasi Nasional (GLN) mengamanatkan kemampuan literasi yang harus dimiliki masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidupnya di abad 21. Kemampuan literasi tersebut di antaranya literasi bahasa (baca tulis), literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. GLN mengamanatkan tiga lingkungan dalam menjalankan gerakan tersebut, yakni gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat.

Peran dan fungsi peningkatan literasi masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pendidikan formal, melainkan juga bagian tanggung jawab dari pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal dan informal bahkan memiliki peran yang strategis, karena kalangan pelajar lebih banyak menghabiskan waktu di luar jam sekolah. Begitu pula dengan masyarakat umum (bukan usia sekolah) yang tentunya lebih banyak beraktivitas dalam ranah keluarga dan masyarakat. Kemampuan literasi tersebut juga harus dikombinasikan dengan kompetensi berfikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selain GLN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga fokus pada kajian literasi, yakni literasi finansial.

Literasi keuangan atau finansial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan atau finansial adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mengelola keuangan secara cerdas, bisa mengatasi rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan, dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya. Literasi finansial merupakan hal yang sangat vital dalam proses menuju kesuksesan pengelolaan keuangan.

Literasi finansial merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara teknis dan kemampuan memprediksi serta mempertimbangkan resiko-resiko yang diambil dalam kegiatan keuangan. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, literasi finansial didefinisikan juga sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan, yang terbagi dalam beberapa indikator yakni kemampuan penganggaran, pemahaman konsep tabungan, pertimbangan resiko pinjaman, dan investasi.

Selain literasi finansial, salah satu objek yang dikaji yakni mengenai literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan dan keterampilan dalam mengatur sebuah informasi dalam dunia digital yang didukung oleh keterampilan dalam pengoperasian perangkat digital yang ada. Terdapat tujuh indikator untuk mengukur kemampuan dan keterampilan literasi digital seseorang. Indikator tersebut adalah literasi informasi, kegiatan digital akademik, kemampuan belajar, literasi TIK, manajemen privasi, komunikasi dan kolaborasi, serta literasi media.

Literasi finansial maupun digital merupakan dua hal yang patut menjadi fokus pada keluarga pekerja migran. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan keuangan mutlak diperlukan keluarga pekerja migran karena manajemen keuangan hasil dari bekerja di luar negeri tentu pada akhirnya akan dikelola oleh keluarga pekerja migran di Indonesia. Akan menjadi hal yang sangat riskan jika keluarga pekerja migran tidak mamahami dalam mengambil keputusan keuangan. Kemampuan seseorang dalam menata keuangan yang baik akan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat dan terhindar dari masalah keuangan. Sejalan dengan kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan, kemampuan memanfaatkan dunia digital juga menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh keluarga pekerja migran. Keterbatasan jarak dan waktu akan sangat terbantu apabila keluarga pekerja migran mampu memanfaatkan dunia digital, terutama dalam berkomunikasi.

Latar belakang pendidikan seseorang menentukan kecerdasan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi. Selain itu latar belakang pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap kemampuan literasi informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sumber informasi elektronik.

Berdasarkan kajian tersebut, keluarga pekerja migran mampu memahami keadaan, terutama kekurangannya dalam penguasaan literasi finansial dan digital, sehingga memungkinkan para keluarga pekerja migran untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan belajar. Sejalan dengan fakta dan tindak lanjut yang dihasilkan dari penelitian ini, keluarga pekerja migran dapat mempersiapkan diri pada revolusi industri 4.0 dengan memiliki penguasaan literasi finansial dan digital yang memadai. Revolusi industri 4.0 menghadapkan manusia pada keadaan yang berhubungan dengan dunia digital.

Penelitian ini dilaksanakan di Payaman, Solokuro, Kabupaten Lamongan pada bulan Januari hingga Maret 2019. Desa Payaman merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah pekerja migran yang tinggi, sehingga dijuluki dengan nama “Desa TKI”.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas keluarga pekerja migran memiliki tingkat literasi finansial yang sedang. Pemahaman dan keputusan keuangan yang dilakukan keluarga pekerja migran tercermin dalam latar belakang penelitian yang lebih dari separuh total remitansi digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif dan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti investasi dan menabung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keluarga pekerja migran belum terlalu memahami isu-isu keuangan termasuk keputusan pengelolaan keuangan.

Hasil analisis pada indikator literasi finansial menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan menabung keluarga pekerja migran masih tertinggal daripada indikator lainnya pada literasi finansial. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memberikan pengaruh terhadap keputusan ekonomi sehingga keluarga pekerja migran dalam meningkatkan literasi finansialnya adalah melalui pendidikan.

Keterampilan dan pengetahuan keluarga pekerja migran mengenai pengelolaan keuangan lebih khusus bidang tabungan hanya dapat ditingkatkan melalui kegiatan belajar pada jalur pendidikan nonformal, karena keterbatasan pendidikan formal menampung kebutuhan belajar keluarga pekerja migran. Kebutuhan pendidikan keluarga pekerja migran dapat dipenuhi melalui jalur pendidikan nonformal seperti program pelatihan. Kelebihan pendidikan nonformal dari pendidikan jalur lainnya adalah integrasi dan kesesuaian materi belajar dengan kebutuhan belajar.

Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan nonformal tidak terikat pada batas administratif seperti usia, waktu, dan tempat. Alasan itulah yang mendasari keluarga pekerja migran dapat meningkatkan kapasitas akademik maupun keterampilannya meskipun tidak lagi berada pada usia sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, pada era revolusi industri 4.0 ini memberikan kemudahan yang luar biasa dalam mengakses program pendidikan melalui gawai dan jaringan internet. Keluarga pekerja migran tidak perlu mengkhawatirkan mengenai program dan penyelenggaraan waktunya. Hal ini karena beragamnya pilihan jenis pelatihan termasuk dalam pengembangan keterampilan bidang finansial.

Tingkat literasi digital keluarga pekerja migran mayoritas masuk dalam ketegori sedang. Berbeda dengan tingkat literasi finansial yang tingkatan kategorinya sangat rendah, dalam literasi digital tingkat kategori rendah hampir seimbang dengan kategori tinggi yang hanya terpaut 2 persen. Hal ini sejalan dengan sebuah kajian yang menyatakan bahwa masyarakat desa belum dapat memaksimalkan peran teknologi informasi yang ditandai dengan kadar tingkat literasi yang rendah cenderung sedang. Tingkat literasi digital keluarga pekerja migran berada pada tingkat sedang, yang rata-rata usianya berada pada usia 35,3 tahun.

Dalam kajian penelitian ini, literasi digital diukur indikatornya. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tujuh indikator, literasi perangkat digital (ICT) serta komunikasi dan kolaborasi merupakan indikator yang paling tinggi nilainya. Hasil kajian tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa keluarga pekerja migran masih memanfaatkan dunia digital dengan sangat sederhana.

Indikator pada literasi digital seperti pemanfaatan dunia digital sebagai peningkatan keterampilan belajar *(learning skills)* serta kegiatan peningkatan kualitas akademik *(digital scholarship)* masih pada tataran rendah. Kesenjangan pemanfaatan dunia digital pada keluarga pekerja migran dapat diperkecil dengan mengkondisikan keluarga pekerja migran dalam program pemberdayaan berupa pelatihan pemanfatan dunia digital dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Keluarga pekerja migran yang cenderung memiliki tingkat literasi finansial maupun literasi digital yang rendah adalah keluarga pekerja migran dengan latar belakang lulusan SD dan SMP. Hal ini semakin menguatkan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemampuan/literasi seseorang.

Hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan intervensi bagi kelompok keluarga pekerja migran, yaitu intervensi peningkatan pengetahuan dan keterampilan berupa program pendidikan nonformal seperti pelatihan dan pemberdayaan bidang finansial maupun digital. Intervensi pendidikan tersebut berguna untuk mempersiapkan keluarga pekerja migran dalam era revolusi industri 4.0. **(ANK)**

Artikel ini ditulis ulang dari kajian yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2019. Judul: Literasi Finansial dan Digital Keluarga Pekerja Migran Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan. Apabila pembaca ingin membaca kajian secara lengkap, silakan memindai kode QR berikut.

Ruang Dialog dan Ekspresi Pemajuan Kebudayaan

Merawat Kebinekaan dan Tingkatkan Literasi Berbahasa

Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa dan sastra (BBS) Indonesia. Peringatan ini tidak lepas dari peringatan Sumpah Pemuda yang juga jatuh di bulan yang sama. Tahun ini, peringatan Bulan Bahasa dan Sastra dilakukan secara berbeda. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring mengingat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Karena itulah tema pada peringatan BBS tahun ini mengangkat "Berbahasa untuk Indonesia Sehat"

Tema ini diusung karena berkaitan erat dengan pemahaman bahwa kemampuan berbahasa dan bersastra yang baik dapat membantu masyarakat untuk saling memahami. Dengan kesalingpahaman, maka persoalan apapun dapat diatasi, termasuk dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tema ini juga menyiratkan optimisme bangsa agar mampu mewujudkan bangsa yang sehat secara jasmani dan rohani.

Bulan Bahasa dan Sastra 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang berkesempatan menyampaikan sambutan dalam Puncak Peringatan BBS 2020, Rabu (28/10/2020) secara daring mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan literasi berbahasa. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah.

Menurut Mendikbud, tanpa kecintaan terhadap bahasa, akan sulit meningkatkan kemampuan literasi. Kemampuan itulah yang menjadi salah satu kunci menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan pembelajar sepanjang hayat, berkompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan normal-normal Pancasila.

Mendikbud menambahkan bahwa keberadaan bahasa Indonesia telah menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa itu, salah satunya dirajut oleh bahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia yang mengukuhkan bangsa, tetapi juga berbagai bahasa daerah.

Untuk itulah, kebijakan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia diarahkan untuk tetap merawat kebinekaan. Saat ini,

Kemendikbud melalui Badan Bahasa telah berhasil memetakan 718 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Anugerah Hoessein Djajadiningrat

Dalam peringatan BBS 2020, Kemendikbud memberikan penghargaan tertinggi di bidang kebahasaan dan kesastraan yang diberi nama Anugerah Hoessein Djajadiningkat. Nama tersebut melekat pada perjuangan menjayakan bahasa dan sastra Indonesia pascakemerdekaan. Penghargaan tersebut diberikan kepada Nur Hassa Wirajuda (kategori Maestro Diplomasi Kebahasaan), Ajib Rosidi (kategori Maestro Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah), Anton M. Moeliono (kategori Maestro Pengembang bahasa Indonesia), dan Gorys Keraf (kategori Maestro Pembina Bahasa Indonesia).

Hoessein Djajadiningkat

Selain penghargaan tersebut, Kemendikbud juga memiliki sejumlah penghargaan lainnya yang diberikan pada insan bahasa dan sastra Indonesia yang telah berjasa dalam meningkatkan literasi berbahasa. Beberapa di antara penghargaan tersebut adalah Penghargaan Sastra Kemendikbud 2020, Anugerah SEA *Write Award* 2018-2020, Anugerah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan 2020, dan Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah 2020.

Selama peringatan BSS, dilakukan pula beragam perlombaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Meskipun hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring, namun hal tersebut menumbuhkan kreativitas dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz mengatakan, beberapa komentar dari para pemerhati bahasa dan sastra menyatakan bahwa BBS tahun ini terasa jauh lebih semarak.

"Sejak 1 Oktober hingga 28 Oktober hari ini, kami telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik di pusat maupun di balai dan kantor bahasa di 30 provinsi, kegiatan itu berupa berbagai lomba (perseorangan atau kelompok), gelar wicara dengan berbagai tema, diskusi yang meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia, dan pertunjukan-pertunjukan kesastraan agar masyarakat mengetahui lebih jelas kreativitas yang disuguhkan oleh balai dan kantor bahasa dari Sabang sampai Merauke," kata Amin.

Kegiatan BBS 2020 telah menarik minat generasi muda termasuk yang memiliki keterbatasan, baik dari penglihatan maupun pendengaran untuk berpartisipasi. Berdasarkan jumlah peserta di pusat dari 17 kegiatan yang diselenggarakan, tercatat ada 11.036 pendaftar, 9.667 peserta, dan 1.096.073 penonton.

Sementara itu, kegiatan "Menjalin Indonesia" yang disiarkan melalui kanal YouTube atau media sosial balai dan kantor bahasa, aplikasi Zoom, serta kehadiran langsung telah disaksikan oleh lebih dari 30.000 orang. Selain menjangkau seluruh wilayah Indonesia, kegiatan BBS 2020 juga diharapkan dapat menunjukkan kekhasan, keunikan, dan keunggulan dari masing-masing wilayah nusantara. Potensi itu merupakan anugerah terbesar yang harus dinikmati bersama dan menciptakan rasa menghargai kebinekaan.

Rangkaian kegiatan pada BBS 2020 juga menjadi tonggak bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud menjadi lembaga yang bermartabat, bermanfaat bagi masyarakat dan menjunjng nilai profesionalisme. Pada kesempatan ini, diluncurkan juga produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Buku Bahan Ajar BIPA yang meliputi Bahan Diplomasi BIPA dan Bahan Ajar BIPA. **(RYK/RAN/ Sumber: Laman Badan Bahasa)**

INFORMASI KONTAK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap melayani permohonan informasi dan layanan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses:

Pusat Panggilan
177

Posel
pengaduan@kemdikbud.go.id

Portal
kemdikbud.lapor.go.id

Portal
ult.kemdikbud.go.id

SELAMAT *Hari* PAHLAWAN

● 10 November 2020 ●

"Pahlawanku Sepanjang Masa"

Kemdikbud.RI | Kemdikbud_RI | kemdikbud.ri | KEMENDIKBUD RI | kemdikbud ri